

Transparency International Corruption Perceptions Index 2009



Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No. 17
Jakarta 12180
Indonesia
Tel: +62-021-7208515
Fax: +62-021-7267815
Email : info@ti.or.id
Website : www.ti.or.id

Mengenai TI-Indonesia:

TI-Indonesia didirikan pada Oktober 2000. TI-Indonesia merupakan salah satu chapter dari Transparency International yang berkedudukan di Berlin, Jerman.

Transparency International – yang didirikan pada tahun 1993 – merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah dunia dan non-profit yang mencurahkan perhatian secara khusus memberantas korupsi.

Transparency International saat ini memiliki 99 national chapter di berbagai belahan dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai TI-Indonesia, silahkan mengakses website <http://www.ti.or.id>



Kontak Media :

Teten Masduki
Sekretaris Jenderal
HP: 0811193391
Email: tmasduki@ti.or.id

Frenky Simanjuntak
Manajer Tata Kelola Ekonomi
Hp: 08161356473
Email: fsimanjuntak@ti.or.id



the coalition against corruption

<http://www.ti.or.id>

Jl. Senayan Bawah No. 17
Jakarta 12180

Indonesia

Tel: +62-021-7208515

Fax: +62-021-7267815

Email: info@ti.or.id

Siaran Pers

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah:

Persepsi pelaku bisnis tentang korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan; kenaikan angka indeks jagan membuat pemerintah jadi berpuas diri

Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index 2009 pada hari ini secara serentak di seluruh dunia. Survei ini mengingatkan kita kembali bahwa korupsi adalah fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia.

180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.

CPI didisain untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Karena itu, CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Salah satu tujuan dari CPI adalah untuk mendorong dilaksanakannya riset dan analisa yang lain untuk mengetahui hal tersebut di atas.

CPI 2009 menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konflik dan instabilitas. Asumsi di atas terbukti bila melihat daftar negara-negara yang memiliki indeks terendah antara lain Somalia (1,1), Afghanistan (1,3), Myanmar, Sudan dan Irak (1,5). Di sisi lain, negara-negara dengan indeks yang tertinggi antara lain Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3), Singapura dan Swedia sama indeksnya (9,2), dan Swiss (9,0) adalah negara-negara dengan tingkat stabilitas ekonomi dan politik yang tinggi.

CPI 2009 Indonesia

Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini

sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).

Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibangga-banggakan karena:

1. Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup
2. Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan

Namun di sisi lain, metode CPI menyatakan bahwa perubahan skor dapat terjadi apabila terjadi perbaikan atau perubahan yang dapat terobservasi dengan jelas. Menurut analisa dari Transparency International Indonesia hal ini dapat dikaitkan pada dua hal, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi Departemen Keuangan. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya skor CPI Indonesia, perubahan yang terjadi di dua institusi tersebut menurut TI-Indonesia cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.

Usaha KPK dalam pemberantasan korupsi relatif baik dibanding dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia. KPK cukup konsisten dalam kerjanya, dan karenanya kepercayaan masyarakat kepadanya semakin tinggi. Indikator yang bisa dilihat secara langsung terlihat dari besarnya dukungan masyarakat terhadap KPK dalam perkembangan terakhir konflik KPK dan Polri. Sementara itu, reformasi di Departemen Keuangan juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pelaku bisnis, terutama di bidang pajak dan bea cukai.

Prestasi dua institusi tersebut, sayangnya belum diikuti dengan perubahan signifikan di institusi publik lain di negara ini. Perkembangan terakhir bahkan menunjukkan ada usaha sistematis melemahkan KPK yang dilakukan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Sementara institusi kejaksaan dan kepolisian yang seharusnya menjadi garda depan penegakan hukum, semakin terpuruk akibat ulah oknum-oknum di dalamnya.

Dengan diluncurkannya CPI 2009, TI-Indonesia dengan ini menghimbau kepada pemerintah agar:

1. Tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi melalui penguatan institusi penegak hukum dan reformasi birokrasi di berbagai lini
2. Lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK secara sistematis yang akan berdampak sangat buruk bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan CPI sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi.

Jakarta, 17 November 2009



Teten Masduki

Sekretaris Jendral TI-Indonesia

Lampiran:

Survei-survei yang dijadikan sumber CPI 2009. Skor Indonesia dihasilkan oleh sumber-sumber yang dicetak tebal.

No	Nama Survei	Institusi Pelaksana
1	Country Performance Assessment Rating 2008	Asian Development Bank
2	Country and Policy Institutional Assessment 2008	African Development Bank
3	Bertelsmann Transformation Index 2009	Bertelsmann Foundation
4	Country Risk Service and Country Forecast 2009	Economist Intelligence Unit
5	Nations in Transit 2009	Freedom House
6	Global Risk Service 2009	IHS Global Insight
7	World Competitiveness Report 2008 & 2009	Institute for Management Development
8	Asian Intelligence 2008 & 2009	Political and Economic Risk Consultancy
9	Country Policy and Institutional Assessment 2008	World Bank
10	Global Competitiveness Report 2008 & 2009	World Economic Forum

Korupsi mengancam pemulihan ekonomi global dan menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang mengalami konflik

Berlin, 17 November 2009 – Melihat pemulihan ekonomi dunia yang mulai tampak dan pergulatan beberapa negara melawan konflik dan isu keamanan yang tengah berlangsung, jelaslah bagi kita bahwa tidak ada bagian manapun di dunia yang kebal terhadap dampak korupsi, sebagaimana dinyatakan oleh Indek Persepsi Korupsi Transparency International 2009 (IPK), sebuah alat ukur korupsi sektor domestik dan publik yang penyarannya dilakukan hari ini.

“Pada saat kita melaksanakan paket stimulus besar-besaran, pencairan dana publik yang dilakukan secara cepat, dan upaya pengamanan perdamaian di seluruh dunia, adalah penting untuk mengenali dalam hal apa korupsi telah menghalangi tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, sehingga kita dapat memutus rantai korupsi yang merusak ini” kata Huguette Labelle, Ketua Transparency International (TI).

Sebagian besar dari 180 negara yang termasuk dalam Indeks 2009 ini mendapatkan nilai di bawah lima dari skala yang berkisar antara nilai 0 (untuk negara yang dianggap sangat korup) sampai nilai 10 (untuk negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi rendah). IPK mengukur tingkatan korupsi yang terlihat pada sektor publik di negara tertentu dan IPK merupakan suatu indeks gabungan, yang menyatukan pendapat 13 ahli dan jajak pendapat bisnis. IPK 2009 memberikan nilai bagi 180 negara, jumlah yang sama dengan yang tercakup dalam IPK 2008.

Negara-negara yang rapuh dan tidak stabil karena berada dalam situasi perang dan konflik menduduki posisi terbawah dalam indeks. Negara-negara itu adalah: Somalia dengan nilai 1.1, Afghanistan dengan nilai 1.3, Myanmar dengan nilai 1.4 dan Sudan bersama Irak mendapat nilai 1.5. Hasil itu menunjukkan bahwa negara yang dipandang sebagai paling korup adalah juga negara yang mengalami konflik berkepanjangan, yang telah mengacaukan infrastruktur tata pemerintahan mereka.

Pada saat lembaga-lembaga penting lemah atau tidak ada, korupsi akan berputar tidak terkendali dan perampasan sumberdaya publik membawa kepada ketidakamanan dan ketiadaan hukuman. Korupsi juga membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga dan pemerintah yang baru terbentuk yang dituntut untuk memberi jaminan kelangsungan hidup dan stabilitas.

Kita tidak bisa membiarkan negara-negara yang menduduki posisi terbawah dalam indeks ini tidak terjangkau upaya-upaya pembangunan. Malahan, dari IPK terlihat bahwa diperlukan upaya memperkuat lembaga-lembaga di negara-negara itu. Investor dan donor harus sama-sama cermat dalam melakukan tindakan mereka selain mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari negara-negara penerima manfaat.

“Untuk melawan korupsi diperlukan pengawasan kuat oleh parlemen, peradilan yang berkinerja baik, badan pemeriksa dan anti korupsi yang independen dan memiliki sumberdaya memadai, penegakan hukum yang kuat, transparansi dalam anggaran publik, pendapatan serta aliran bantuan, dan juga ruang bagi media independen

serta masyarakat sipil yang dinamis,” kata Labelle. “Masyarakat internasional harus menemukan cara-cara yang efisien untuk membantu negara yang berada dalam situasi perang untuk berkembang dan melanjutkan lembaga-lembaga mereka.”

Negara-negara yang mendapat nilai tertinggi dalam IPK 2009 adalah Selandia Baru yang memperoleh nilai 9.4, Denmark 9.3, Singapura dan Swedia sama-sama memperoleh 9.2 dan Swis 9.0. Nilai-nilai itu mencerminkan stabilitas politik, peraturan konflik kepentingan yang sudah lama terbentuk, serta lembaga publik yang mantap dan berkinerja baik.

Hasil menyeluruh dalam IPK 2009 sangat memprihatinkan karena korupsi terus bercokol walau secara tersembunyi saat ada banyak ketidakjelasan, saat lembaga publik perlu diperkuat dan saat pemerintah belum menerapkan kerangka hukum antikorupsi.

Bahkan negara industrialis tidak dapat berpuas diri: pasokan korupsi dan fasilitasi korupsi seringkali melibatkan perusahaan yang berkedudukan di negara mereka. Yurisdiksi kerahasiaan keuangan yang terkait dengan banyak negara yang dalam IPK duduk di posisi puncak, telah menghalangi upaya-upaya melawan korupsi dan pengambilalihan kembali aset yang dicuri.

“Uang hasil korupsi tidak boleh menemukan tempat berlabuh yang aman. Ini saatnya kita berhenti membuat berbagai alasan,” kata Labelle. “Pekerjaan OECD di wilayah ini disambut gembira, namun harus ada kesepakatan bilateral mengenai pertukaran informasi untuk mengakhiri secara tuntas rejim kerahasiaan. Pada saat yang sama perusahaan harus berhenti beroperasi di tempat-tempat memiliki praktik keuangan ilegal.”

Suap, kartel, dan praktik korup lainnya melemahkan persaingan dan menyebabkan kerugian sangat besar dalam bidang sumberdaya pembangunan di semua negara, terutama negara-negara termiskin. Antara tahun 1990 dan 2005, lebih dari 283 kartel internasional telah diekspos dan konsumen seluruh dunia mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 300 milyar Dolar Amerika karena harus membayar harga yang lebih dari semestinya, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan TI baru-baru ini.

Karena sebagian besar negara yang masuk dalam IPK 2009 mendapat nilai di bawah 5, korupsi adalah tantangan yang tidak dapat disangkal. Kelompok 20 (*G20*) telah membuat komitmen kuat untuk memastikan bahwa integritas dan transparansi akan menjadi batu penjurus yang mendasari struktur perundang-undangan yang baru disusun. Sejalan dengan upaya Kelompok 20 (*G20*) menangani sektor keuangan dan reformasi ekonomi, sangatlah penting memandang korupsi sebagai ancaman substansial yang dapat menghalangi terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Kelompok 20 (*G20*) harus tetap memegang komitmen untuk memperoleh dukungan publik dalam rangka melakukan reformasi dengan membuat lembaga seperti Dewan Stabilitas Keuangan (*Financial Stability Board*) serta keputusan mengenai investasi dalam hal infrastruktur menjadi transparan dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil.

Secara global dan nasional, lembaga-lembaga pengawas dan kerangka hukum yang sungguh-sungguh diberlakukan, diperkuat oleh peraturan yang lebih efektif dan cerdas, akan memastikan adanya tingkat korupsi yang lebih rendah. Hasilnya, kepercayaan yang lebih besar yang dibutuhkan oleh lembaga publik akan dapat dibangun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bantuan pembangunan

yang lebih efektif akan dapat diwujudkan. Yang paling penting, hal ini akan mengentaskan penderitaan manusia dalam skala besar di negara-negara yang memiliki kinerja paling buruk dalam Indeks Persepsi Korupsi.

###

Transparency International adalah organisasi masyarakat madani internasional yang memimpin perjuangan melawan korupsi.

Kontak Media:

Gypsy Guillén Kaiser

Tel: +49 30 34 38 20 19 or

+49 30 34 38 20 662

E-mail: press@transparency.org



This Excel-sheet presents the Corruption Perceptions Index 2009 and additional background data. For information on data and methodology please consult the press release and the methodology documentation at www.transparency.org/cpi

ADB: Country Performance Assessment Ratings by the Asian Development Bank
 AFDB: Country Policy and Institutional Assessment by the African Development Bank
 BF: Bertelsmann Transformation Index by the Bertelsmann Foundation
 EIU: Country Risk Service and Country Forecast by the Economist Intelligence Unit
 FH: Nations in Transit by Freedom House
 GI: Global Risk Service by IHS Global Insight
 IMD: World Competitiveness Report by the Institute for Management Development
 PERC: Asian Intelligence by Political and Economic Risk

Country Rank	Country / Territory	CPI 2009 Score	Standard Deviation	Minimum Maximum Range		90 % Confidence Interval	
				Min	Max	Lower bound	Higher bound
1	New Zealand	9.4	0.3	8.8	9.7	9.1	9.5
2	Denmark	9.3	0.3	8.8	9.6	9.1	9.5
3	Singapore	9.2	0.3	8.6	9.5	9.0	9.4
3	Sweden	9.2	0.2	8.8	9.5	9.0	9.3
5	Switzerland	9.0	0.1	8.8	9.2	8.9	9.1
6	Finland	8.9	0.8	7.5	9.5	8.4	9.4
6	Netherlands	8.9	0.2	8.5	9.2	8.7	9.0
8	Australia	8.7	0.6	7.5	9.2	8.3	9.0
8	Canada	8.7	0.3	8.3	9.2	8.5	9.0
8	Iceland	8.7	1.3	6.7	9.6	7.5	9.4
11	Norway	8.6	0.7	7.4	9.2	8.2	9.1
12	Hong Kong	8.2	0.5	7.5	8.9	7.9	8.5
12	Luxembourg	8.2	0.9	6.7	9.1	7.6	8.8
14	Germany	8.0	0.5	7.5	8.8	7.7	8.3
14	Ireland	8.0	0.5	7.5	8.8	7.8	8.4
16	Austria	7.9	0.7	6.7	8.6	7.4	8.3
17	Japan	7.7	0.5	7.1	8.8	7.4	8.0
17	United Kingdom	7.7	0.7	6.7	8.8	7.3	8.2
19	United States	7.5	0.9	5.7	8.8	6.9	8.0
20	Barbados	7.4	1.1	6.4	8.8	6.6	8.2
21	Belgium	7.1	0.4	6.7	7.5	6.9	7.3
22	Qatar	7.0	1.8	4.5	9.1	5.8	8.1
22	Saint Lucia	7.0	0.4	6.7	7.5	6.7	7.5
24	France	6.9	0.6	6.0	7.6	6.5	7.3
25	Chile	6.7	0.4	6.0	7.1	6.5	6.9
25	Uruguay	6.7	0.5	6.2	7.5	6.4	7.1
27	Cyprus	6.6	0.7	6.0	7.4	6.1	7.1
27	Estonia	6.6	0.7	5.1	7.1	6.1	6.9
27	Slovenia	6.6	0.6	5.5	7.5	6.3	6.9
30	United Arab Emirates	6.5	1.4	4.9	7.5	5.5	7.5
31	Saint Vincent and the Grenadines	6.4	1.3	4.9	7.5	4.9	7.5
32	Israel	6.1	1.0	4.7	7.2	5.4	6.7
32	Spain	6.1	0.8	4.7	6.7	5.5	6.6
34	Dominica	5.9	0.9	4.9	6.7	4.9	6.7

35	Portugal	5.8	0.5	5.3	6.7	5.5	6.2
35	Puerto Rico	5.8	0.8	4.9	6.7	5.2	6.3
37	Botswana	5.6	0.7	4.7	6.7	5.1	6.1
37	Taiwan	5.6	0.5	5.1	6.7	5.4	5.9
39	Brunei Darussalam	5.5	1.0	4.7	6.7	4.7	6.4
39	Oman	5.5	1.6	3.1	7.1	4.4	6.5
39	South Korea	5.5	0.4	4.8	6.0	5.3	5.7
42	Mauritius	5.4	0.7	4.7	6.7	5.0	5.9
43	Costa Rica	5.3	0.9	4.6	6.7	4.7	5.9
43	Macau	5.3	1.8	3.3	6.9	3.3	6.9
45	Malta	5.2	1.4	3.3	6.7	4.0	6.2
46	Bahrain	5.1	1.2	3.1	6.0	4.2	5.8
46	Cape Verde	5.1	1.8	3.3	7.0	3.3	7.0
46	Hungary	5.1	0.9	3.8	6.7	4.6	5.7
49	Bhutan	5.0	0.9	3.9	6.0	4.3	5.6
49	Jordan	5.0	1.8	3.1	7.5	3.9	6.1
49	Poland	5.0	0.9	3.1	6.0	4.5	5.5
52	Czech Republic	4.9	1.2	3.7	7.5	4.3	5.6
52	Lithuania	4.9	0.9	3.7	6.7	4.4	5.4
54	Seychelles	4.8	1.9	3.0	6.7	3.0	6.7
55	South Africa	4.7	0.5	3.8	5.1	4.3	4.9
56	Latvia	4.5	0.6	3.6	5.1	4.1	4.9
56	Malaysia	4.5	1.0	3.1	6.2	4.0	5.1
56	Namibia	4.5	0.9	3.1	5.6	3.9	5.1
56	Samoa	4.5	1.1	3.3	5.3	3.3	5.3
56	Slovakia	4.5	0.8	3.4	5.2	4.1	4.9
61	Cuba	4.4	0.9	3.5	5.1	3.5	5.1
61	Turkey	4.4	0.8	3.1	5.4	3.9	4.9
63	Italy	4.3	0.9	3.3	5.2	3.8	4.9
63	Saudi Arabia	4.3	1.5	2.3	5.9	3.1	5.3
65	Tunisia	4.2	1.9	2.3	6.6	3.0	5.5
66	Croatia	4.1	0.8	3.3	5.2	3.7	4.5
66	Georgia	4.1	1.0	2.7	5.2	3.4	4.7
66	Kuwait	4.1	1.3	2.7	6.0	3.2	5.1
69	Ghana	3.9	1.1	2.5	5.1	3.2	4.6
69	Montenegro	3.9	0.6	3.2	4.7	3.5	4.4
71	Bulgaria	3.8	1.1	2.5	5.2	3.2	4.5
71	FYR Macedonia	3.8	0.6	3.1	4.6	3.4	4.2
71	Greece	3.8	0.8	2.9	5.1	3.2	4.3
71	Romania	3.8	1.0	2.4	4.9	3.2	4.3
75	Brazil	3.7	0.8	3.1	5.6	3.3	4.3
75	Colombia	3.7	1.0	2.6	5.2	3.1	4.3
75	Peru	3.7	0.7	3.1	4.8	3.4	4.1
75	Suriname	3.7	0.9	3.0	4.7	3.0	4.7
79	Burkina Faso	3.6	1.3	1.9	5.1	2.8	4.4
79	China	3.6	1.1	2.3	5.5	3.0	4.2
79	Swaziland	3.6	1.0	3.0	4.7	3.0	4.7
79	Trinidad and Tobago	3.6	0.8	2.9	4.7	3.0	4.3
83	Serbia	3.5	0.5	3.1	4.5	3.3	3.9
84	El Salvador	3.4	0.5	2.6	3.9	3.0	3.8
84	Guatemala	3.4	0.7	2.6	4.5	3.0	3.9
84	India	3.4	0.4	2.6	3.9	3.2	3.6
84	Panama	3.4	0.4	3.1	3.9	3.1	3.7
84	Thailand	3.4	0.8	2.1	4.4	3.0	3.8
89	Lesotho	3.3	0.8	2.4	4.7	2.8	3.8
89	Malawi	3.3	1.0	1.9	4.8	2.7	3.9

89	Mexico	3.3	0.3	3.1	3.8	3.2	3.5
89	Moldova	3.3	1.0	2.2	5.2	2.7	4.0
89	Morocco	3.3	0.8	2.3	4.7	2.8	3.9
89	Rwanda	3.3	0.5	2.6	3.8	2.9	3.7
95	Albania	3.2	0.3	2.8	3.6	3.0	3.3
95	Vanuatu	3.2	1.3	2.3	4.7	2.3	4.7
97	Liberia	3.1	1.0	1.9	3.8	1.9	3.8
97	Sri Lanka	3.1	0.5	2.3	3.8	2.8	3.4
99	Bosnia and Herzegovina	3.0	0.6	2.2	3.9	2.6	3.4
99	Dominican Republic	3.0	0.2	2.7	3.3	2.9	3.2
99	Jamaica	3.0	0.4	2.6	3.4	2.8	3.3
99	Madagascar	3.0	0.4	2.5	3.5	2.8	3.2
99	Senegal	3.0	1.0	1.8	5.1	2.5	3.6
99	Tonga	3.0	0.3	2.6	3.3	2.6	3.3
99	Zambia	3.0	0.3	2.6	3.5	2.8	3.2
106	Argentina	2.9	0.4	2.5	3.5	2.6	3.1
106	Benin	2.9	0.8	1.8	3.8	2.3	3.4
106	Gabon	2.9	0.2	2.6	3.1	2.6	3.1
106	Gambia	2.9	1.7	1.5	4.9	1.6	4.0
106	Niger	2.9	0.2	2.6	3.1	2.7	3.0
111	Algeria	2.8	0.4	2.3	3.4	2.5	3.1
111	Djibouti	2.8	0.6	2.0	3.3	2.3	3.2
111	Egypt	2.8	0.4	2.4	3.5	2.6	3.1
111	Indonesia	2.8	0.7	1.6	3.7	2.4	3.2
111	Kiribati	2.8	0.5	2.3	3.3	2.3	3.3
111	Mali	2.8	0.6	2.0	3.3	2.4	3.2
111	Sao Tome and Principe	2.8	0.5	2.4	3.3	2.4	3.3
111	Solomon Islands	2.8	0.5	2.3	3.3	2.3	3.3
111	Togo	2.8	1.4	1.6	5.1	1.9	3.9
120	Armenia	2.7	0.2	2.3	2.9	2.6	2.8
120	Bolivia	2.7	0.5	2.1	3.3	2.4	3.1
120	Ethiopia	2.7	0.4	2.0	3.1	2.4	2.9
120	Kazakhstan	2.7	1.0	1.7	4.6	2.1	3.3
120	Mongolia	2.7	0.5	2.0	3.3	2.4	3.0
120	Viet Nam	2.7	0.7	1.8	3.9	2.4	3.1
126	Eritrea	2.6	1.5	1.6	4.7	1.6	3.8
126	Guyana	2.6	0.1	2.5	2.7	2.5	2.7
126	Syria	2.6	0.5	1.7	3.1	2.2	2.9
126	Tanzania	2.6	0.4	1.9	3.1	2.4	2.9
130	Honduras	2.5	0.4	1.8	3.0	2.2	2.8
130	Lebanon	2.5	0.6	1.9	3.1	1.9	3.1
130	Libya	2.5	0.5	1.8	3.3	2.2	2.8
130	Maldives	2.5	0.8	1.7	3.3	1.8	3.2
130	Mauritania	2.5	1.2	1.8	5.1	2.0	3.3
130	Mozambique	2.5	0.4	1.8	3.1	2.3	2.8
130	Nicaragua	2.5	0.4	1.8	2.8	2.3	2.7
130	Nigeria	2.5	0.4	1.9	3.1	2.2	2.7
130	Uganda	2.5	0.6	1.8	3.5	2.1	2.8
139	Bangladesh	2.4	0.6	1.4	3.1	2.0	2.8
139	Belarus	2.4	0.5	1.8	3.1	2.0	2.8
139	Pakistan	2.4	0.5	1.7	3.1	2.1	2.7
139	Philippines	2.4	0.5	1.8	3.4	2.1	2.7
143	Azerbaijan	2.3	0.5	1.7	2.9	2.0	2.6
143	Comoros	2.3	0.9	1.6	3.3	1.6	3.3
143	Nepal	2.3	0.5	1.7	2.9	2.0	2.6
146	Cameroon	2.2	0.6	1.6	3.1	1.9	2.6

146	Ecuador	2.2	0.4	1.8	2.7	2.0	2.5
146	Kenya	2.2	0.4	1.8	2.9	1.9	2.5
146	Russia	2.2	0.4	1.6	2.6	1.9	2.4
146	Sierra Leone	2.2	0.4	1.8	2.7	1.9	2.4
146	Timor-Leste	2.2	0.6	1.3	2.7	1.8	2.6
146	Ukraine	2.2	0.5	1.7	3.1	2.0	2.6
146	Zimbabwe	2.2	0.9	1.3	3.3	1.7	2.8
154	Côte d'Ivoire	2.1	0.5	1.6	3.1	1.8	2.4
154	Papua New Guinea	2.1	0.5	1.4	2.7	1.7	2.5
154	Paraguay	2.1	0.5	1.7	2.7	1.7	2.5
154	Yemen	2.1	0.6	1.4	2.7	1.6	2.5
158	Cambodia	2.0	0.3	1.5	2.5	1.8	2.2
158	Central African Republic	2.0	0.2	1.9	2.4	1.9	2.2
158	Laos	2.0	0.7	1.5	2.9	1.6	2.6
158	Tajikistan	2.0	0.7	1.4	3.3	1.6	2.5
162	Angola	1.9	0.1	1.8	2.0	1.8	1.9
162	Congo-Brazzaville	1.9	0.3	1.4	2.4	1.6	2.1
162	Congo Democratic Republic	1.9	0.3	1.6	2.4	1.7	2.1
162	Guinea-Bissau	1.9	0.1	1.8	2.0	1.8	2.0
162	Kyrgyzstan	1.9	0.2	1.6	2.3	1.8	2.1
162	Venezuela	1.9	0.2	1.5	2.1	1.8	2.0
168	Burundi	1.8	0.3	1.4	2.3	1.6	2.0
168	Equatorial Guinea	1.8	0.1	1.6	1.9	1.6	1.9
168	Guinea	1.8	0.1	1.6	1.9	1.7	1.8
168	Haiti	1.8	0.5	1.4	2.3	1.4	2.3
168	Iran	1.8	0.1	1.7	1.9	1.7	1.9
168	Turkmenistan	1.8	0.1	1.6	1.9	1.7	1.9
174	Uzbekistan	1.7	0.2	1.3	1.9	1.5	1.8
175	Chad	1.6	0.2	1.4	1.9	1.5	1.7
176	Iraq	1.5	0.3	1.2	1.8	1.2	1.8
176	Sudan	1.5	0.2	1.2	1.8	1.4	1.7
178	Myanmar	1.4	0.5	0.9	1.8	0.9	1.8
179	Afghanistan	1.3	0.3	0.9	1.6	1.0	1.5
180	Somalia	1.1	0.3	0.9	1.4	0.9	1.4

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2009

Catatan Singkat Tentang Metodologi

1. IPK dibuat dengan menggunakan data dari sumber-sumber yang berkembang selama dua tahun terakhir. Untuk hasil IPK tahun 2009, data ini juga mencakup hasil survei dari tahun 2008 dan tahun 2009.
2. IPK 2009 dihitung dengan menggunakan data dari 13 sumber yang berasal dari 10 lembaga independen. Semua sumber mengukur cakupan korupsi secara keseluruhan (yaitu frekuensi dan/atau besarnya suap) baik di sektor publik maupun sektor politik dan semua sumber menghasilkan peringkat negara-negara, yaitu mencakup asesmen dari berbagai negara.
3. Untuk sumber IPK yang berupa data survei, jika survei yang sama dilakukan selama beberapa tahun, untuk kelancaran penghitungan, hanya data dari 2 tahun terakhir saja yang dimasukkan.
4. Untuk sumber IPK yang berupa nilai yang diberikan oleh para ahli (badan maupun pakar analisa resiko), hanya penilaian terbaru yang diikutsertakan karena biasanya penilaian tersebut bersifat *peer review* dan jarang berubah dari tahun ke tahun.
5. Evaluasi terhadap tingkat korupsi di berbagai negara dilakukan oleh pakar negara bersangkutan, baik yang tinggal di negara tersebut mau pun yang tidak. Untuk IPK tahun 2009, tujuh sumber berikut ini menyediakan data yang didasarkan pada analisis para pakar: *Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia, Yayasan Bertelsmann, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight* dan Bank Dunia. Tiga sumber dalam IPK 2009 mencerminkan evaluasi yang dilakukan oleh pemimpin bisnis yang tinggal di suatu negara IMD, Konsultan Resiko Politik dan Ekonomi dan Forum Ekonomi Dunia.
6. Untuk menentukan nilai *mean* dari sebuah negara, standardisasi dilakukan dengan cara teknik pencocokan persentil (*percentile matching technique*). Teknik ini menggunakan peringkat negara yang dilaporkan oleh setiap sumber perorangan. Metode ini berguna untuk menggabungkan sumber yang memiliki persebaran yang berbeda. Walaupun beberapa informasi dapat hilang, teknik ini memungkinkan seluruh laporan yang dinilai masih tetap berada dalam batas-batas IPK, yaitu tetap diantara angka 0 sampai 10.
7. Transformasi beta kemudian diterapkan pada nilai-nilai yang telah dihasilkan. Hal ini memperbesar deviasi standar diantara semua negara-semua negara yang dicakup oleh IPK dan menghindari proses yang menggunakan teknik pencocokan persentil yang menghasilkan deviasi standar yang lebih kecil dari tahun ke tahun.
8. Semua nilai yang telah distandarisasi dari sebuah negara kemudian dihitung rata-ratanya, untuk menentukan nilai negara tersebut.
9. Nilai dan peringkat IPK disertai oleh banyaknya sumber-sumber yang diacu, perbedaan tinggi-rendahnya, deviasi standar dan tingkat kepercayaan diri setiap negara.
10. Tingkat kepercayaan diri ditentukan melalui metodologi *bootstrap* (yang bersifat nonparametris). Metodologi ini memungkinkan pembuatan presuposisi/asumsi terhadap ketepatan hasil. Kepercayaan diri sebesar 90% kemudian dibentuk, di dalamnya ada 5% probabilitas bahwa nilai ada di bawah atau di atas tingkat kepercayaan diri yang sesungguhnya.

Untuk keterangan lebih terperinci mengenai metode IPK silakan kunjungi www.transparency.org/cpi

Indeks Persepsi Korupsi 2009 Pertanyaan yang Sering Muncul

Pertanyaan Umum

- Apakah Indeks Persepsi Korupsi itu (IPK)?
- Untuk mencapai tujuan IPK, bagaimana korupsi didefinisikan?
- Mengapa IPK hanya didasarkan pada persepsi?
- Bagaimana tanggal peluncuran IPK 2009 dipilih?
- Bagaimana IPK mendapat dukungan dana?

Pertanyaan mengenai metode

- Berapa negara dinilai oleh IPK 2009?
- Bagaimana negara/wilayah dipilih untuk masuk dalam IPK?
- Mengapa ada negara yang tidak lagi dimasukkan ke dalam IPK, dan mengapa ada negara baru?
- Negara apa saja yang mungkin masuk dalam IPK di masa mendatang?
- Apa sumber-sumber data untuk membuat IPK?
- Pendapat siapa saja yang dikumpulkan dalam survei yang dipergunakan oleh IPK?
- Apakah kekuatan IPK membawa pengaruh pada responden?
- Bagaimana IPK 2009 dibuat?
- Apakah ada perubahan dalam metodologi IPK 2009?

Perubahan Nilai antara 2008 dan 2009

- Dapatkah nilai yang tercantum dalam IPK 2009 dibandingkan dengan nilai IPK di tahun-tahun sebelumnya?
- Negara/wilayah mana yang paling banyak mengalami penurunan nilai antara tahun 2008 dan 2009?
- Negara/wilayah mana yang paling banyak mengalami peningkatan nilai antara tahun 2008 dan 2009?

Menginterpretasikan IPK

- Apa yang lebih penting. Peringkat atau nilai suatu negara?
- Apakah negara yang mendapatkan angka terendah merupakan negara paling terkorup di dunia dan sebaliknya?
- Contoh: apa yang tersirat dari peringkat Somalia yang berada paling bawah dan Selandia Baru yang berada paling atas berdasarkan IPK 2009?
- Mengapa perubahan (atau kurangnya perubahan) reformasi di bidang anti korupsi atau skandal-skandal korupsi terkini tidak selalu tampak jelas dari nilai suatu negara?
- Apakah IPK merupakan ukuran yang bisa diandalkan dalam membuat keputusan mengenai alokasi bantuan?
- Bagaimana IPK berkaitan dengan produk riset TI lainnya?

Pertanyaan Umum

Apakah Indeks Persepsi Korupsi itu (IPK)?

Indeks Persepsi Korupsi Transparency International memberi peringkat kepada suatu negara berdasarkan tingkat korupsi yang terlihat ada di antara pejabat pemerintah dan politisi di negara tersebut. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.

Untuk mencapai tujuan IPK, bagaimana korupsi didefinisikan?

IPK memfokuskan diri pada korupsi di sektor publik. Survei-survei yang hasilnya digunakan dalam pengumpulan data IPK memuat pertanyaan mengenai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan perorangan. Hal ini mencakup misalnya pertanyaan mengenai penyuaipan terhadap pejabat publik, kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa di sektor publik, penggelapan dana publik mau pun pertanyaan mengenai kekuatan dan efektifitas upaya-upaya anti korupsi yang sekaligus mencakup aspek administratif dan politik dari korupsi.

Mengapa IPK hanya didasarkan pada persepsi?

Sulit untuk menilai keseluruhan tingkatan korupsi di berbagai negara jika berdasarkan pada data empiris, yaitu dengan membandingkan jumlah uang suap atau jumlah dakwaan atau pun kasus penyuaipan di persidangan. Dalam hal jumlah kasus yang disidangkan, misalnya, data-data yang diperbandingkan hanya menyorot pada mutu para jaksa, pengadilan dan/atau media dalam memunculkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di seluruh negara. Karena itu, salah satu metoda yang solid dalam mengumpulkan data adalah dengan menanyakan pengalaman dan persepsi mereka yang secara langsung paling dekat dengan realitas korupsi di sebuah negara.

Bagaimana tanggal peluncuran IPK 2009 dipilih?

Semua keputusan mengenai tanggal peluncuran IPK sedunia dibuat di Sekretariat Transparency International di Berlin. Tanggal tertentu dipilih dengan pemikiran untuk memaksimalkan perhatian dunia dan biasanya dikaitkan dengan peristiwa internasional.

Bagaimana IPK mendapat dukungan dana?

Transparency International didanai oleh berbagai badan pemerintahan, yayasan dan perusahaan internasional. Bantuan mereka memungkinkan TI melaksanakan IPK (untuk keterangan lebih lanjut mengenai sumber-sumber dana Transparency International's sources of funding, silakan lihat http://www.transparency.org/support_us/support). Bantuan tambahan berupa perangkat pengukuran diberikan oleh Ernst & Young. TI tidak serta merta mendukung atau menyetujui kebijakan suatu perusahaan dengan menerima bantuan keuangan dari perusahaan tersebut, dan TI tidak pula melibatkan satu pun pendukungnya dalam mengelola proyek-proyek TI.

Pertanyaan mengenai metode

Berapa negara dinilai oleh IPK 2008?

IPK 2009 menentukan peringkat 180 negara, jumlah yang sama dengan tahun 2008.

Bagaimana negara-negara dipilih untuk dimasukkan dalam IPK?

Minimum harus ada tiga sumber data andal mengenai korupsi harus dimiliki oleh sebuah negara atau wilayah agar dapat dimasukkan dalam IPK. Penyertaan suatu negara dalam IPK tidak berarti bahwa di negara tersebut ada indikasi korupsi namun semata karena ketersediaan data minimum yang menjadi persyaratan.

Negara/wilayah manakah yang tidak lagi ada dalam IPK 2009 dan mengapa ada negara/wilayah yang ditambahkan?

Negara/wilayah hanya dapat dimasukkan ke dalam IPK jika paling sedikit memiliki 3 sumber data yang tersedia. Tahun 2009 pencakupan negara tempat data individual dikumpulkan mengalami perubahan. Ini memungkinkan negara Brunei Darussalam untuk dimasukkan dalam IPK. Sayangnya, Belize harus dikeluarkan dari IPK tahun ini karena mereka hanya memiliki satu sumber data.

Negara apa saja yang mungkin masuk dalam IPK di masa mendatang?

Transparency International secara terus menerus dan aktif berupaya meningkatkan jumlah negara dan wilayah cakupan IPK.

Negara atau wilayah dengan dua sumber data (tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam IPK) adalah : Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bermuda, Brunei, Kepulauan Cayman, Fiji, Grenada, Liechtenstein, Micronesia (Federasi Negara-negara), Belanda, Antilles, Korea Utara, Palestina, St. Kitts & Nevis dan Tuvalu. Semua negara/wilayah tersebut di atas membutuhkan tambahan satu sumber data lagi agar dapat diikutsertakan dalam IPK.

Apa sumber-sumber data untuk membuat IPK?

IPK 2009 dibuat berdasarkan data dari 13 jajak pendapat dan survei dari 10 lembaga independen. Sumber data harus dipublikasikan dalam kurun 2 tahun terakhir agar dapat dianggap memenuhi syarat. Semua sumber data harus membuat peringkat negara dan harus mengukur cakupan keseluruhan korupsi. Dengan syarat ini, survei yang mencampuradukkan korupsi dengan isu lain seperti ketidakstabilan politik, desentralisasi atau pun nasionalisme, misalnya, tidak dapat dipergunakan.

TI berupaya memastikan bahwa sumber-sumber yang dipergunakan memiliki mutu tinggi dan hasil-hasil survei diperoleh dari integritas yang tinggi. Untuk dianggap berkualitas, suatu data harus didokumentasikan dengan baik dan metodologi dijelaskan agar keandalan data dapat dinilai.

Beberapa lembaga yang menyumbang data kepada TI secara cuma-cuma untuk dipergunakan menghitung IPK tidak mengizinkan pengungkapan data yang mereka berikan karena evaluasi hanya tersedia bagi yang meminta. Lembaga lain menyediakan data mereka untuk publik. Daftar lengkap data survei, rincian pertanyaan dan jumlah responden IPK 2009 dapat dilihat dalam metodologi IPK 2009 di <http://www.transparency.org/cpi>

Pendapat siapa saja yang dikumpulkan dalam survei yang dipergunakan oleh IPK?

Kepakaran yang tercermin dalam nilai-nilai IPK dicapai dari pemahaman akan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh mereka yang berada baik di negara industrialis mau pun negara berkembang dan mencakup survei pelaku bisnis dan pembuat analisa suatu negara. Sumber yang menyediakan data IPK mengandalkan pakar yang tinggal di dalam mau pun di luar negara yang dinilai. Penting dikemukakan bahwa pandangan pakar yang tinggal di dalam suatu negara dan mereka yang berada di luar negri berkorelasi tinggi.

Apakah kekuatan IPK membawa pengaruh pada responden?

IPK telah memperoleh pengakuan secara luas dalam berbagai media internasional sejak penerbitan pertamanya tahun 1995. Ini menimbulkan kekawatiran bahwa penilaian responden mungkin dibayangi oleh data yang dilaporkan oleh TI, yang akan menimbulkan problem sirkularitas. Hipotesis ini diuji tahun 2006 dengan menggunakan sebuah pertanyaan survei yang dilemparkan kepada para pemimpin dunia usaha di seluruh dunia. Lebih dari 9000 jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan tentang IPK tidak mendorong para pakar bisnis ini untuk begitu saja “mengikuti tren”. Pengetahuan tentang IPK dapat memberikan motivasi bagi responden untuk menentukan pandangan mereka sendiri, Temuan ini merupakan indikasi kuat bahwa tidak terjadi sirkularitas dalam pendekatan yang sekarang diambil.

Bagaimana IPK 2009 dibuat?

IPK dibuat oleh Sekretariat Transparency International di Berlin. TI mengumpulkan data, menghubungi ahli dan membicarakan metode, serta menghitung Indeks. Di tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan ini dilakukan oleh konsultan dan penasihat senior TI.

TI telah memiliki proses akurat dalam mengecek ulang hasil akhir, dengan bekerjasama dengan sejumlah pakar dari berbagai universitas dan lembaga terkemuka. Di tahun-tahun terakhir, metodologi IPK disediakan oleh Komisi Penasehat Indeks TI (http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/about). Lebih jauh, tahun 2009 sekelompok pakar memberi nasihat kepada TI saat sedang melakukan penghitungan dan meninjau ulang pembuatan indeks : [Andrew Gelman \(Columbia University\)](#), Rajshri Jayaraman ([European School of Management and Technology](#)), Meghan O'Malley Berry (Columbia University), [Piero Stanig \(London School of Economics\)](#) dan [Andreas Stephan \(JIBS, Jönköping University; CESIS, KTH Stockholm\)](#). Catherine Muller dan Marc Vothknecht (DIW Berlin - German Institute for Economic Research) memberikan saran tambahan dan secara mandiri menguji penghitungan IPK 2009.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai metode IPK, silakan lihat metodologi IPK 2009 (www.transparency.org/cpi).

Perubahan nilai di tahun 2008 dan 2009

Dapatkan nilai suatu negara/wilayah yang tercantum dalam IPK 2009 dibandingkan dengan nilai IPK di tahun-tahun sebelumnya?

IPK terutama berfungsi sebagai kumpulan pandangan pelaku bisnis dan pembuat analisa di suatu negara di tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari metodologinya, IPK bukanlah alat yang cocok untuk memonitor ada tidaknya kemajuan dalam kurun waktu tertentu. Cara yang paling bisa diandalkan untuk membandingkan nilai sebuah negara dalam kurun waktu tertentu adalah dengan mengacu pada sumber survei individual, yang dapat menunjukkan perubahan dalam penilaian.

Perubahan nilai yang didapatkan oleh suatu negara dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh perubahan persepsi yang ditunjukkan terhadap kinerja negara yang bersangkutan atau oleh perubahan penentuan peringkat yang diberikan oleh sumber asli atau perubahan dalam metodologi IPK. Jika mungkin, TI telah mengidentifikasi perubahan itu dalam bentuk nilai yang dapat diidentifikasi dalam sumber-sumber datanya.

Negara/wilayah mana yang paling banyak mengalami penurunan antara tahun 2008 dan 2009?

Sebagaimana disebutkan di atas, metode IPK kurang tepat digunakan untuk membuat perbandingan nilai dari tahun ke tahun. Namun, mengingat perubahan dapat dilacak kembali ke sumber data individual, tren dapat diidentifikasi.

Contoh yang patut dicatat disini adalah penurunan dari nilai IPK 2008 ke 2009 yang disepakati oleh lebih dari separuh sumber, dialami oleh Bahrain, Greece, Iran, Malaysia, Malta and Slovakia. Dalam kasus-kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan persepsi analis dan orang-orang bisnis terkait dengan tingkat korupsi muncul selama dua tahun terakhir.

Negara/wilayah mana yang paling banyak mengalami peningkatan antara tahun 2008 dan 2009?

Dengan menggunakan ketentuan yang sama, dan berdasarkan data dari sumber yang telah secara konsisten dipergunakan dalam penghitungan indeks, peningkatan nilai dari 2008 ke 2008 dapat dilihat pada Bangladesh, Belarus, Guatemala, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Syria dan Tonga.

Menginterpretasikan IPK

Apa yang lebih penting, peringkat atau nilai suatu negara?

Nilai sebuah negara merupakan indikator yang jauh lebih penting dari pada peringkatnya dalam memberikan persepsi mengenai tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut. Peringkat negara dapat berubah semata karena ada negara-negara baru yang diikutsertakan atau ada negara yang tidak diikutsertakan lagi dalam Indeks.

Apakah negara yang mendapatkan angka terendah merupakan negara paling korup di dunia dan sebaliknya?

Tidak. Negara dengan nilai terendah adalah negara di mana tingkat korupsi dilihat paling tinggi terjadi dibandingkan dengan negara lain yang diikutsertakan dalam IPK. Ada lebih dari 200 negara berdaulat di seluruh dunia, dan IPK 2009 memberikan peringkat 180 dari negara-negara tersebut. IPK tidak menyediakan informasi mengenai negara-negara yang tidak diikutsertakan. Lebih jauh, IPK adalah sebuah asesmen tentang persepsi korupsi administratif dan politis – IPK bukanlah sebuah vonis mengenai bangsa atau masyarakat secara keseluruhan. Publik umum di Negara/wilayah yang ada di posisi bawah dan posisi atas IPK sama-sama prihatin dan turut mengutuk korupsi. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Barometer Korupsi Global (*Global Corruption Barometer*) TI.

Contoh: apa yang tersirat dari peringkat Somalia yang berada paling bawah dan Selandia Baru yang berada paling atas berdasarkan IPK 2009?

Korupsi di Somalia dinilai sebagai yang tertinggi di dalam IPK 2009. Namun, ini tidak berarti bahwa Somalia adalah negara terkorup di dunia atau bahwa orang-orang Somalia adalah orang terkorup di dunia. Walau pun korupsi sesungguhnya adalah salah satu tantangan yang paling sulit ditaklukkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan kemiskinan di Somalia, sebagian besar masyarakat merupakan korban korupsi. Korupsi dilakukan oleh oknum penguasa, dan kegagalan pemimpin dan lembaga negara mengawasi dan mencegah korupsi tidak serta merta menjadi negara tersebut serta masyarakatnya sebagai yang paling korup.

Sama halnya, Selandia Baru – yang memiliki persepsi korupsi sektor publik paling rendah di antara 180 negara yang disurvei – tidak mesti merupakan “negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia” – dan warga Selandia Baru tidaklah kebal terhadap korupsi. Walaupun kerangka kelembagaan dan tata pemerintahan Selandia Baru telah diwujudkan dalam sesuatu yang dilihat sebagai suatu keberhasilan, dengan tingkat korupsi yang rendah, Selandia Baru – sebagai mana negara lainnya – tetap rentan terhadap korupsi.

Mengapa perubahan, (atau kurangnya perubahan) reformasi di bidang anti korupsi atau skandal-skandal korupsi terkini tidak selalu terlihat jelas dari nilai suatu negara?

Meningkatkan nilai IPK dalam waktu singkat merupakan hal yang sulit. IPK 2008 didasarkan pada data yang paling banyak dihimpun dalam 2 tahun terakhir, dan data-data tersebut berhubungan dengan persepsi yang mungkin telah terbentuk sebelumnya. Ini artinya, perubahan substansial dalam persepsi terhadap korupsi hanya mungkin terjadi dan terlihat dalam indeks yang dibuat dalam kurun waktu yang lebih lama.

Apakah IPK merupakan ukuran andal bagi tingkat persepsi korupsi di suatu negara?

IPK adalah perangkat ukur yang mantap dalam menilai persepsi mengenai korupsi. Untuk itu, IPK telah diuji dan dipergunakan secara luas baik oleh kaum peneliti maupun pembuat analisa. Namun, keandalan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Negara-negara yang memiliki jumlah sumber data yang tinggi dan evaluasi terhadap data menunjukkan kesenjangan rendah (seperti ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan diri) memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi baik dari segi nilai maupun peringkat. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka tingkat keandalan pun menjadi rendah.

Apakah IPK ukuran andal untuk membuat keputusan mengenai alokasi bantuan?

Pemerintah di beberapa negara telah berupaya menggunakan nilai korupsi untuk menentukan negara mana yang akan mendapatkan bantuan dan mana yang tidak. TI tidak mendorong negara manapun menggunakan IPK untuk tujuan ini. Negara yang dianggap sangat korup tidak dapat diabaikan begitu saja. Justru negara-negara inilah yang perlu dibantu keluar dari pusaran kemiskinan akibat korupsi. Jika sebuah negara dianggap korup, IPK harusnya dilihat para donor sebagai investasi yang dibutuhkan untuk melakukan pendekatan sistemik dalam memerangi korupsi. Lebih lanjut, jika donor bermaksud mendukung proyek-proyek pembangunan di negara-negara yang dinilai korup, mereka harus memperhatikan secara khusus berbagai “bendera merah” yang ada dan memastikan pembentukan proses pengawasan yang memadai.

Bagaimana IPK berkaitan dengan produk riset TI lainnya?

TI adalah sebuah lembaga independen yang menghasilkan riset empiris mengenai korupsi. TI telah menyusun sebuah portfolio global yang menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, indikator tingkat makro disertai diagnostik mendalam, analisis pakar, serta survei yang didasarkan pada persepsi. Badan riset ini menyediakan gambar menyeluruh dari skala, sebaran, dan dinamika korupsi di seluruh dunia. Badan ini juga bertugas menggerakkan dan mendukung reformasi kebijakan yang secara efektif dibuat dan didasarkan pada bukti. Portfolio produk riset global TI mencakup:

- **Barometer Korupsi Global (*Global Corruption Barometer – BKG*):** sebuah survei yang mewakili lebih dari 70.000 keluarga di 65 negara di dunia mengenai persepsi dan pengalaman tentang korupsi. Barometer Korupsi Global terkini dipublikasikan tanggal 3 Juni dan dapat dilihat di:

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb.

- **Indeks Pelaku Suap (*Bribe Payers Index -IPS*):** sebuah daftar peringkat negara-negara pengeksport terkemuka berdasarkan kemungkinan terjadinya suap yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mereka di luar negeri. Daftar peringkat ini didasarkan pada survei para eksekutif tentang praktik bisnis perusahaan asing di negara mereka. **Indeks Pelaku Suap** terkini dipublikasikan tanggal 9 Desember 2008 dan dapat dilihat di:

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi.

- **Laporan Korupsi Global (*Global Corruption Report- LKG*):** sebuah laporan yang melihat korupsi dalam hubungannya dengan sebuah sektor tertentu atau isu tertentu mengenai tata pemerintahan. Laporan ini memaparkan pandangan sejumlah pakar dan praktisi di bidang tersebut, sebagai tambahan terhadap studi kasus dan laporan dari bab-bab mengenai berbagai negara di dunia. LKG juga

menampilkan temuan riset lainnya yang terkait dengan korupsi dan relevan dengan tema. Laporan Korupsi Global terkini dipublikasikan tanggal 23 September 2009 dan dapat dilihat di:

<http://www.transparency.org/publications/gcr>

- **Asesmen Sistem Integritas Nasional (*National Integrity System assessments* -SIN):** serangkaian kajian yang dihasilkan dalam sebuah Negara yang mencakup sebuah asesmen ekstensif mengenai kekuatan dan kelemahan lembaga-lembaga kunci yang memungkinkan terciptanya tata pemerintahan yang baik dan integritas dalam negara itu . Asesmen SIN dipublikasikan secara terus-menerus. Untuk melihat daftar lengkap asesmen dan informasi lebih lanjut, lihat:

http://www.transparency.org/policy_research/nis

Indeks Persepsi Korupsi (*The Corruption Perceptions Index- IPK*) adalah pilar kelima dalam portfolio ini yang memuat persepsi pakar mengenai korupsi melalui sebuah indeks gabungan yang mencakup 180 negara .

© 2009 Transparency International. All rights reserved.